

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic country*) yang terdiri dari 17.506 pulau dengan luas wilayah perairan 5,3 juta km dan panjang pantai adalah 81.000 km (berkurang setelah pisahnya Timor-Timur). Dengan demikian wilayah pesisir Indonesia memiliki sumberdaya kelautan (SDK) yang sangat melimpah salah satunya dalam aspek perikanan (Hikmah, 2008).

Dengan luas pesisir tersebut, maka banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Perikanan No. 31 tahun 2004, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Jumlah nelayan di Indonesia cukup banyak. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2006), jumlah nelayan di Indonesia tahun 1994 adalah 2.315.787. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.935.289 (Kinseng, 2007).

Pulau Madura secara geografis merupakan salah satu pulau kecil di Indonesia yang dikelilingi oleh hamparan laut. Oleh karena itu pulau Madura terkenal dengan pantai dan kehidupan pesisirnya, tidak heran pulau Madura disebut juga pulau garam karena pulau ini juga salah satu produsen garam

terbesar di Indonesia akibat letaknya yang strategis untuk memproduksi garam.

Sebagaimana daerah pesisir lainnya, pulau Madura juga menyimpan potensi sumber daya perikanan yang dijadikan mata pencaharian bagi penduduknya. Sebagian besar penduduk nelayan di sepanjang pesisir selat Madura tergantung dari keberadaan sumberdaya perikanannya. Nelayan yang kebanyakan dalam skala kecil dan tradisional sangat bergantung pada luas wilayah perairan antara 0-4 mil, dibandingkan dengan jumlah nelayan jika diperkirakan dalam setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah perairan laut dieksploitasi oleh kira-kira 6,5 orang nelayan. Ini mengindikasikan kurang seimbang antara jumlah nelayan dengan kondisi sumberdaya yang tersedia (Hikmah, 2008 : 5).

Masalah *over fishing* inilah yang seringkali berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan. Akibatnya nelayan melakukan andon-istilah untuk menyebut pergi ke daerah lain untuk mencari ikan (Kusnadi, 2002). Sebagian lain tetap memilih bertahan di perairan sempit dengan sumberdaya terbatas. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan konflik, baik diantara kelompok nelayan lokal maupun antara nelayan lokal dengan kelompok nelayan pendatang (Hikmah, 2008 : 5).

Konflik antar nelayan juga seringkali dipicu oleh perbedaan jaring atau alat tangkap. Peristiwa ini terjadi antara nelayan lokal atau nelayan setempat dengan nelayan pendatang atau andon.

Nelayan Andon seringkali datang dengan menggunakan alat tangkap yang lebih modern. Ini membuat hasil tangkapan nelayan andon lebih banyak ketimbang nelayan lokal atau asli setempat. Seperti ditulis oleh Kusnadi (2002), sebenarnya jika nelayan lokal sama-sama mendapat hasil tangkapan ikan, hal itu tidak menjadi masalah. Namun jika nelayan andon mendapat hasil tangkapan sedangkan nelayan lokal tidak, hal ini seringkali menjadi pemicu konflik (Kusnadi, 2002).

Konflik antar nelayan “tradisional” dengan nelayan “modern” sudah lama terjadi. Nelayan “modern” sesuai dengan namanya menggunakan alat tangkap modern yaitu *trawl*. Sedangkan nelayan tradisional masih menggunakan alat tangkap jaring tradisional. Bahkan peristiwa itu sudah terjadi sebelum era 1980-an dan sampai memakan korban jiwa (Kinseng, 2007).

Hal senada juga ditulis Anais Tain (2011), nelayan pendatang biasanya memiliki peralatan tangkap yang lebih modern dibanding nelayan setempat. Akibatnya hasil tangkapan nelayan setempat yang sudah menurun menjadi jauh lebih sedikit. Persoalan ini sering menyulut konflik antar nelayan, terlebih di era otonomi daerah ini masing-masing kelompok nelayan mendapat dukungan dari pemerintah daerahnya (Tain, 2011).

Menurut Muhsoni (2006), hasil tangkapan para nelayan di selat Madura tergolong rendah. Rendahnya produktivitas nelayan terutama di sekitar selat Madura disebabkan oleh fenomena *over fishing* yang selama ini terjadi. Semakin banyaknya jumlah nelayan tangkap tidak diimbangi dengan

jumlah hasil tangkapan sehingga berujung pada semakin rendahnya pendapatan nelayan. Hasil estimasi perikanan pelagis di perairan Selat Madura menunjukkan indikasi bahwa *over fishing* sudah terjadi sejak tahun 1997. Sedangkan perikanan demersal di perairan Selat Madura menunjukkan telah terjadi *over fishing* sejak tahun 2003 (Widodo, 2011).

Dibanding dengan kawasan perairan laut yang lain di Jawa Timur, perairan Selat Madura memiliki potensi perikanan yang relatif sedikit, kawasan ini juga tidak dilalui migrasi musiman ikan (Kusnadi, 2002). Akibatnya potensi konflik dalam memperebutkan ikan di daerah ini cukup tinggi.

Frekuensi konflik nelayan di Selat Madura relatif lebih tinggi dengan faktor pemicu utama adalah pelanggaran jalur penangkapan ikan dan perebutan daerah tangkap. Hal ini disebabkan lebih dari 30 % nelayan Jawa Timur bermukim dan mencari ikan dalam wilayah perairan Selat Madura yang sempit. Kondisi tersebut menyiratkan ketidakseimbangan antar ketersediaan sumber daya perikanan dan populasi nelayan yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga memunculkan konflik (Wardhani, 2007).

Di Jawa Timur sendiri menurut Kusnadi dan A. Rahim (2007), fenomena konflik nelayan telah terjadi sejak tahun 1970-an. Menurutnya konflik terbesar terjadi di Muncar Banyuwangi pada 30 September 1974. Saat itu nelayan membakar jaring dan fasilitas pabrik (Kusnadi & Rahim A, 2007).

Sedangkan Bangkalan, yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah 1.260,14 Km<sup>2</sup> dan berada di bagian Barat pulau Madura, memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Kita bisa lihat, tiga wilayah Kabupaten Bangkalan berbatasan dengan lautan yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura, hanya sebelah timur yang berbatasan dengan daratan yakni dengan Kabupaten Sampang (Badan Pusat Statistik Bangkalan, 2011).

Konflik antar nelayan di Kabupaten Bangkalan sering terjadi di wilayah Kwanyar. Kwanyar sendiri merupakan salah satu kecamatan di antara 18 Kecamatan yang ada. Kecamatan ini merupakan daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

Konflik nelayan di Kwanyar sudah sering terjadi. Menurut Slamet Widodo (2011), tercatat sejak 1995 hingga 2006 telah terjadi 23 kali konflik antar nelayan di Kecamatan Kwanyar. Puncak konflik terjadi pada tahun 1997, yaitu konflik antara nelayan Kwanyar (Kwanyar Barat, Batah Barat, Batah Timur) dengan nelayan asal Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Sejak saat itu, sering terjadi konflik bahkan sering berujung saling serang ketika berada di tengah laut. Kondisi yang tidak kondusif ini menyebabkan intensitas melaut menjadi berkurang. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2002 (Widodo, 2011).

Nelayan Kwanyar juga sering terlibat konflik dengan nelayan dari daerah pesisir lain yang disebabkan oleh perebutan wilayah untuk

menangkap ikan. Seperti yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2009, nelayan dari Desa Karang Anyar sempat bersitegang dengan nelayan asal Ngemplak Pasuruan (Koran Madura, 5 Februari 2009).

Pada pertengahan tahun 1995, telah terjadi bentrokan fisik antar dua komunitas nelayan yaitu antara nelayan Bangkalan dengan nelayan Lamongan karena alasan perebutan daerah penangkapan ikan. Ini terjadi di perairan Karangjumuang, Bangkalan Utara, Madura. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian yang ditaksir cukup besar yaitu sekitar Rp 40 juta. Dua perahu milik nelayan Lamongan musnah dibakar dan ikan hasil tangkapan mereka dibuang ke laut (Hikmah, 2008).

Nelayan Kwanyar juga seringkali terlibat konflik dengan nelayan Pasuruan. Kedua kelompok nelayan dari dua daerah yang berbeda itu bertarung di tengah laut dengan menggunakan senjata tajam. Mereka tidak ragu untuk saling membunuh. Jatuh korban nyawa sudah sering terjadi akibat konflik antara nelayan Pasuruan dengan nelayan Kwanyar ini. seperti yang diutarakan Fahmi, tokoh masyarakat Kwanyar sendiri:

“ Antara Pasuruan dengan masyarakat Kwanyar saling serang, dimana ya pake senjata tajam, pake bom itu bondet itu dilempar itu, ya udah kayak perang itu, kayak perang antara pasukan perahu dengan pasukan perahu jadi perang sampe terjadi korban, jatuh korban.”

Sejak tahun 2003, konflik mulai mereda dikarenakan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur telah menempatkan keamanan laut (kamla) yang merupakan gabungan dari Satuan Polisi Air dan Udara serta Angkatan Laut. Meskipun demikian, masih terjadi konflik antar nelayan karena perebutan wilayah tangkap dan penggunaan alat tangkap jenis *mini trawl* oleh nelayan

lain. Konflik terjadi karena keterbatasan jumlah personel kamlu. Namun demikian, kuantitas konflik sudah berkurang dibandingkan sebelum ada kamlu di wilayah Kwanyar (Widodo, 2011).

Identitas kebudayaan Madura ternyata tidak mampu mendamaikan kedua kelompok nelayan tersebut. Masing-masing pihak mendefinisikan eksistensinya berdasarkan nilai-nilai lokalitas yang kontekstual, yang dianggapnya lebih tepat dan menguntungkan kehidupannya dalam interaksi sosial (Kusnadi dkk. 2005).

Begitu juga pemerintah, sepertinya tidak mampu dalam menangani kasus-kasus konflik yang terjadi antar nelayan. Kasus konflik nelayan yang meluas di berbagai daerah perairan Jawa Timur contohnya, merupakan akibat dari kekurangmampuan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) dalam memahamkan esensi otonomi daerah yang terkait dengan batas-batas administrasi daerah dan kewenangannya mengelola potensi sumber daya laut setempat kepada masyarakat nelayan di kawasan pesisir (Kusnadi, 2002).

Bahkan menurut Novri Susan, konflik antar nelayan di Indonesia memiliki akar serabut yang cukup rumit. Banyak sekali persoalan dasar yang menjadi penyebab konflik di antara nelayan. Pertama berkaitan dengan kebijakan negara dalam bentuk regulasi. Kebijakan ini menjadi permasalahan ketika isi regulasi tidak memberdayakan nelayan dan tidak adanya penegakan hukum kelautan (Susan, 2009: 165).

Menurut Kinseng (2007), ketersediaan sumber daya alam di laut semakin lama akan semakin menipis, dengan kata lain semakin langka.

Sebab itulah intensitas konflik di antara kaum nelayan di Indonesia ke depannya akan semakin meningkat (Kinseng, 2007).

Konflik nelayan ini berefek terhadap nelayan dalam melakukan aktivitasnya sebagai nelayan yakni melaut. Hal ini seperti dikemukakan Fahmi:

“Kwanyar Barat sendiri konflik besar ya efek lah, efek dari konflik yang dialami tetangga, tetangga desa. Kalo desa Kwanyar Baratnya sendiri ya gak ada konflik, cuma yang terjadi itu kan desa sebelah yaitu desa Batah, itu yang konflik dengan, dengan nelayan Pasuruan, cuma efeknya ya ke kita, kita juga takut untuk berlayar, takut juga untuk pergi ke laut menangkap ikan karena takut dikira orang Batah itu. Efek ya kita, jadi tidak berani untuk melaut”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mukaffi:

“Ya nelayan yang lain kemudian, kemudian takut. Takut untuk melaut. Kalo takut melaut berarti di, dia gak punya mata pencaharian. Mengurangi konsentrasi”.

Dari yang pernyataan di atas dapat diartikan konflik berakibat tidak hanya terhadap para nelayan yang terlibat konflik. Namun juga pada mereka yang tidak terlibat, dan membuat mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Berbagai solusi telah dilakukan agar konflik antar nelayan di kawasan Kabupaten Bangkalan telah dilakukan, salah satunya dari pemerintah Bangkalan sendiri. Namun solusi yang dilakukan pemerintah belum cukup efektif meredam konflik. Hal itu seperti yang dikemukakan Fahmi :

“Peran pemerintah ya ada diantaranya pas waktu itu ada dari TNI di daerah kita itu, ada Patroli laut ada, cuma ya istilahnya mungkin kurangnya personel waktu itu yaa sering terjadi juga kendati ada pengamanan. Pemerintah juga banyak mendukung untuk pengamanan dan perdamaian dari dua eee,, Kecamatan yang bertikai itu”.



Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi lain untuk dapat menyelesaikan dan atau mengelola konflik agar konflik tidak sampai berujung destruktif. Solusi tersebut kiranya berlandaskan pada nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat setempat itu sendiri. Supaya solusi tersebut mudah dan efektif diterapkan. Supaya solusi tersebut berlandaskan terhadap nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat setempat, maka diperlukan kajian terhadap nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat setempat tersebut. Lebih spesifik lagi adalah sebuah kajian terhadap bagaimana nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat setempat dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan konflik.

Oleh sebab itu kajian terhadap kearifan lokal masyarakat nelayan Bangkalan dibutuhkan untuk dapat memahami nilai serta pengetahuan masyarakat nelayan Bangkalan tersebut. Dimana nantinya nilai serta pengetahuan yang ada pada masyarakat nelayan Bangkalan dapat dijadikan penyelesaian terjadinya konflik antar nelayan.

Kearifan lokal secara konseptual merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga (Sartini, 2004).

Sedangkan modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan

dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas (Suryanto, 2012).

Oleh karena demikian, kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan Bangkalan dapat dijadikan modal sosial untuk menciptakan sebuah solusi konflik. Bukankah konflik, jika sampai pada kekerasan fisik apalagi hingga memakan korban jiwa merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas dan kesatuan bangsa. Bahkan juga ancaman bagi kemanusiaan.

## **1.2. Fokus Penelitian.**

Berpijak pada masalah di atas inilah penelitian ini dilakukan. Juga atas dasar persoalan di ataslah masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question* yaitu bagaimana model penyelesaian konflik nelayan di kawasan Bangkalan? *Subquestion* juga dibuat untuk memperdalam penelitian ini. Berikut inilah *subquestionnya*:

1. Bagaimana bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan Bangkalan?
2. Bagaimana penyelesaian konflik nelayan yang pernah dilakukan?
3. Bagaimana kearifan lokal dapat dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan Bangkalan?

## **1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian**

Dengan memahami bentuk, pola, serta penyebab konflik, diharapkan konflik antar nelayan dapat diminimalisir terjadinya. Bukan hanya itu, juga dengan mengetahui solusi-solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan

konflik, maka kemudian kita dapat memilah mana solusi atau model penyelesaian konflik yang sesuai dengan nelayan tersebut.

Terjadinya konflik nelayan di perairan Bangkalan harus segera diatasi karena konflik tersebut telah merugikan serta berefek terhadap banyak pihak. Efek-efek yang diakibatkan oleh konflik nelayan seperti:

- a) Beberapa nelayan yang tidak terlibat konflik menjadi takut untuk mencari ikan di laut. Ini mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka terganggu.
- b) Membuat masyarakat sekitar resah dan takut sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari mereka.
- c) Konflik nelayan juga mengganggu stabilitas keamanan nasional

Kiranya harus ada model penyelesaian serta penanggulangan terjadinya konflik nelayan dengan berbasis pada kearifan lokal sebagai modal sosial. Agar supaya penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan menggunakan potensi kearifan lokal setempat. Dengan demikian, penyelesaian konflik nelayan di Bangkalan diharapkan lebih mudah dilakukan dan diterapkan.

Selama ini studi yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya konflik nelayan seringkali adalah studi dengan pendekatan atau perspektif ilmu Hukum. Seperti yang dilakukan Maulinna Kusumo Wardhani pada tahun 2007 berjudul “Konflik Nelayan di Selat Madura: Kajian Produk dan Perundangan di Indonesia”. Studi yang dilakukan Zainatul Hikmah dengan judul “Analisis Konflik Nelayan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Selat Madura dalam Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur)” tahun 2008 juga memiliki tema yang sama namun ia mendekatinya dengan perspektif ilmu Hukum dan Sosiologi. Beberapa studi tentang nelayan madura dilakukan oleh Kusnadi, akan tetapi studi tersebut dalam lingkup keilmuan Antropologi. Sepengetahuan penulis, belum ada studi yang meneliti model penyelesaian konflik nelayan berbasis kearifan lokal di wilayah Bangkalan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus penelitian :

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan Bangkalan.
- b. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola penyelesaian konflik nelayan yang dilakukan saat ini.
- c. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumber-sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengembangkan teori konflik yang ada pada kehidupan nelayan.
- b. Menggali informasi dan pengetahuan tentang adanya kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai modal sosial untuk menyelesaikan konflik yang ada.

- c. Menggali informasi dan pengetahuan tentang model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal sebagai modal sosial.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi pedoman untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.
- b. Sebagai bahan materi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan terkait pencegahan maupun penyelesaian konflik nelayan.